

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan,1998, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Bandung:Armico
- Baldric Siregar,2017, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, UPP STIM YKPN, Yogyakarta,
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Syaukani HR,(ed.all), 2016, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Dua Satria Offset, Yogyakarta.
- I Gede Pantja Astawa, 2009, Problematika Hukum Otonomi daerah di Indonesia, Bandung:Alumni
- Josef Riwo Kaho,1998, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri
- Koeswara Kertapradja, 2008, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yogyakarta:andi
- Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moh. Mahfdud MD, 2001, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi, Rineka Cipta,Jakarta.
- Moh.Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Siguntang, Jakarta.
- Ni'Matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar.
- Nurlan Darise, 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks, Jakarta
- Prabawa Utama, 1991, Pemerintahan di Daerah, IND-HILL.CO;Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

B. Tesis dan Disertasi

Danang Suryo yunanto, 2015, Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Blora, *Tesis*, Magister Akuntansi UGM, Yogyakarta.

Margono, 2015, Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang, *Tesis*, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.

Maya Kumalasari, 2016, Analisis Konsistensi Antara Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara, Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang, *Tesis*, Magister Akuntansi UGM, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825)

D. Sumber Lainnya

Nasional Kontan.co.id” <https://nasional.kontan.co.id/news/kua-ppas-bisa-disahkan-tanpa-persetujuan-dprd>” diakses pada tanggal 9 Mei 2018

OryzaWirawaan:http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/315064/pol_emik_apbd_2018_bupati_jember_tunggu_arahan_gubernur.html diakses pada tanggal 1 – Januari – 2018.

OryzaWirawan“http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/317656/gubernur_keluarkan_surat_terkait_nasib_apbd_jember_2018.html” diakses pada tanggal 5 Mei 2018

OryzaWirawan“http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/317716/sk_gubernur_soal_perkada_apbd_jember_direvisi.html” diakses pada tanggal 5 Mei 2018

OryzaWirawan“http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/326451/siap_a_yang_bakal_dikenai_sanksi_bupati_atau_dprd_jember?.html” dikases pada tanggal 7 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Jember tertanggal 25 April 2018

Hasil wawancara dengan Abdul Halim tertanggal 22 – Mei – 2018 di Magister Akuntansi UGM

Hasil wawancara dengan Riawan Tjandra tertanggal 30 – Juni – 2018 di Universitas Atma Jaya